

REPRESENTASI IDEOLOGI NEGARA DALAM BUKU TEKS SEJARAH

Indah Wahyu Puji Utami

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

ABSTRACT

History lesson is a medium to embed state ideological discourse. One of the instruments used in this practice is a history textbook. History textbooks written based on the curriculum set by the state as part of the official history. History textbooks represent various state ideology such as, constitutionalism, anti-communism, stability, development, democracy, anti-New Order and economic globalization.

Keywords: *history, textbooks, representation, ideology*

ABSTRAK

Pelajaran sejarah merupakan salah satu sarana untuk menanamkan wacana ideologi negara. Salah satu instrumen yang digunakan dalam praktik ini adalah buku teks sejarah. Buku teks sejarah disusun berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh negara dan merupakan bagian dari sejarah resmi. Buku teks merepresentasikan berbagai ideologi negara di dalamnya, antara lain konstitusionalisme, anti komunisme, stabilitas, pembangunan, demokrasi, anti Orde Baru dan globalisasi ekonomi.

Kata kunci: *sejarah, buku teks, representasi, ideologi*

PENDAHULUAN

Sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang penting, baik bagi siswa yang merupakan generasi penerus bangsa, maupun bagi negara dan/atau penguasa. Pendidikan sejarah juga merupakan salah satu cara untuk melestarikan memori kolektif. Menurut S. Hamid Hasan (2008:404-406) ingatan bersama terbentuk

dengan dua cara. Pertama adalah apabila orang-orang tersebut mengalami peristiwa yang sama. Kedua adalah dengan mempelajari peristiwa-peristiwa tersebut melalui cerita sejarah. Cerita sejarah untuk kepentingan pendidikan adalah medium utama pendidikan sejarah dalam membangun dan mengembangkan memori kolektif bangsa.

Ingatan atau memori kolektif bangsa yang dibangun, dikembangkan dan dilestarikan melalui pendidikan sejarah tentu saja tidak lepas dari kepentingan negara. Secara universal, pendidikan sejarah di jenjang pendidikan dasar dan menengah selalu ditentukan dan didasarkan pada tafsiran resmi pemerintah (*official history*). Dalam sejarah resmi itu negara tidak saja menentukan visi dan tafsiran tentang suatu peristiwa sejarah tetapi juga menentukan peristiwa apa saja yang harus masuk dalam kurikulum (S. Hamid Hasan, 2008:413). Oleh karenanya tidak mengherankan jika ada beberapa peristiwa yang penting namun tidak masuk dalam kurikulum karena dianggap bertentangan dengan kepentingan negara, misalnya saja penahanan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dicap PKI pasca peristiwa G30S. Peristiwa ini memiliki dampak yang luar biasa dalam masyarakat, namun tidak pernah sekalipun masuk dalam kurikulum sejarah.

KEPENTINGAN NEGARA DALAM PELAJARAN SEJARAH

Wawan Darmawan (2010:108) mengungkapkan bahwa pelajaran sejarah diasosiasikan dengan pengembangan karakter bangsa. Oleh karenanya tujuan pelajaran sejarah juga terkait dengan ideologi politik negara. Negara pada umumnya memandang bahwa pembentukan karakter bangsa dari para warga negaranya merupakan tanggung jawab negara. Pembentukan karakter ini dilakukan melalui pendidikan, termasuk diantaranya melalui pelajaran sejarah.

Implikasi dari kuatnya kepentingan negara dalam pendidikan sejarah adalah pelajaran sejarah yang bersifat dogmatis daripada memberikan nalar kritis memperoleh kearifan masa lalu. Pelajaran sejarah diberikan sebagai indoktrinasi ideologi dan kepentingan negara.

Noam Chompsky (dalam H.A.R. Tilaar, 2003:61) mengungkapkan:

The indoctrination is necessary because schools are, by and large, designed to support the interest of the dominant segment of society, those people who have wealth and power. Early on in your education you are socialized to understand the need to support the power structure, primarily corporation—the business class

Chomsky menunjukkan bahwa sekolah bukanlah institusi yang netral seperti yang sering dipahami oleh masyarakat selama ini. Sekolah pun tidak lepas dari kepentingan penguasa.

Ideologi negara memasuki relung-relung dunia pendidikan bukan hanya dalam strukturnya, tapi juga dalam isi atau kurikulumnya. Pengalaman selama Orde Baru menunjukkan betapa ideologi telah dijadikan sumber indoktrinasi yang telah mematikan kreativitas peserta didik. Ideologi yang seharusnya menjadi pembimbing telah berubah menjadi alat penekan dari penguasa dalam mengendalikan sistem dan isi pendidikan nasional (H.A.R. Tilaar, 2003:67). Kondisi ini masih berlanjut hingga saat ini, meskipun intensitasnya tak sekuat pada masa Orde Baru.

Indoktrinasi ideologi negara melalui pembelajaran sejarah bukanlah fenomena khas Indonesia. Gonzalo de Amézola (2007) misalnya pernah meneliti tentang indoktrinasi melalui pembelajaran sejarah di Argentina. Hasil penelitiannya adalah semua buku teks sejarah yang terbit antara 1956 sampai 1983 di Argentina selalu memuat konsep tentang tanah air, otoritas, keteraturan, dan tingkatan. Kediktatoran digambarkan sebagai suatu hal yang tak terhindarkan dan wajar dalam pemerintahan Argentina.

Fenomena yang sama juga terjadi di Rusia. Menurut Victor Shnirelman (2009) wacana sejarah dalam buku pelajaran sejarah di Rusia sangat tersentralisasi dan dikuasai oleh negara. Wacana alternatif di luar wacana resmi negara tidak diperkenankan untuk muncul dalam buku teks. Implikasi dari sentralisasi dan penyeragaman wacana ini adalah adanya beberapa kelompok etnis tertentu di Rusia yang termarginalkan dan memori kolektifnya tidak diakui oleh negara.

Sejarah resmi (*official history*) yang diajarkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia menurut S. Hamid Hasan (2008:415) memiliki beberapa karakteristik tertentu. Pertama, peristiwa-peristiwa dalam sejarah

ditandai antara proses konflik antara dua atau lebih pihak. Sayangnya tafsiran terhadap konflik seringkali bersifat hitam putih dan penuh dengan rasa dendam. Pemerintahan penjajahan (Belanda, Inggris, Jepang) selalu digambarkan dalam sisi buruknya sebagai penyebab kesengsaraan rakyat.

Di masa kemerdekaan, ketika terjadi konflik antara daerah dengan pusat maka tafsiran semacam itu dilanjutkan. Daerah adalah bagian yang serba salah sedangkan pusat adalah yang serba benar sehingga pusat memiliki segala legalitas untuk menegakkan kekuasaannya terhadap daerah, termasuk menggunakan segala cara. Pembeneran terhadap apa yang dilakukan pemerintah pusat menyebabkan sisi-sisi positif dan kebenaran dari gerakan daerah dalam penentangan terhadap pemerintah pusat tidak ditonjolkan atau bahkan ada kecenderungan untuk diabaikan seperti halnya dengan sisi-sisi negatif dari pemerintah pusat dalam setiap tindakannya terhadap pemerintah daerah yang tidak pernah diungkapkan

Kedua, narasi sejarah nasional dalam tafsiran resmi selalu pula diwarnai oleh gambaran hitam putih dan penuh kebencian terhadap masa lalu. Pemerintah penjajahan adalah pemerintah yang penuh dengan segala kesalahan dan pemerintahan Republik Indonesia penuh dengan kebenaran. Ketika sejarah Republik Indonesia berkembang dan muncul Republik Indonesia Serikat (RIS) umurnya sangat singkat dan buku teks belum sempat ditulis kembali dengan visi pemerintah yang baru sehingga tidak diketahui bagaimana pandangan pemerintah RIS terhadap pemerintahan RI yang lahir sebelumnya. Setelah RIS bubar dan pemerintahan kembali ke negara kesatuan RI, keberadaan pemerintahan RIS merupakan suatu masa gelap. Pemerintah RI dengan sistem pemerintahan parlementer menjadi suatu gambaran keberhasilan dalam kehidupan ketatanegaraan republik yang masih muda tersebut. Ketika keluar dekrit dan Indonesia kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dan terlebih ketika pemerintahan masa demokrasi terpimpin, pemerintahan liberal dianggap sebagai suatu kesalahan dan penyimpangan dari keinginan bangsa Indonesia.

Pada masa Orde Baru maka pemerintahan lama yang diberi label Orde Lama berada pada sisi hitam dari penafsiran dan pemerintah yang menggantikannya (Orde Baru) berada pada sisi putih. Segala kesalahan

pemerintah Orde Lama dijadikan tema sajian utama dan rasa kebencian pada pemerintah Orde Lama dengan komunis menjadikan kebencian itu menjadi lebih besar dan warna hitamnya semakin kental. Pada masa kini di mana reformasi bergulir dan menjadi warna kuat dan dominan dalam gerakan masyarakat dan pemerintah, suasana kebencian terhadap Orde Baru pun muncul.

Karakteristik sejarah resmi yang demikian itu berimplikasi pada penulisan buku teks yang belum mampu mengembangkan sikap bahwa semua peristiwa yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari perjalanan kehidupan bangsa ini dan menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang. Penulisan buku teks sejarah secara hitam dan putih dan tidak menumbuhkan sikap kritis akan membuat siswa terjebak dalam kungkungan wacana ideologi negara, padahal tujuan pendidikan sebenarnya adalah membebaskan manusia. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses untuk menemukan identitas seseorang atau suatu kelompok.

Proses pendidikan yang sebenarnya adalah proses pembebasan dengan jalan memberikan kepada peserta didik suatu kesadaran akan kemampuan kemandirian atau memberikan kekuasaan padanya untuk menjadi individu. Oleh sebab itu, proses pendidikan yang benar adalah yang membebaskan seseorang dari berbagai kungkungan atau *empowering*, atau penyadaran akan kemampuan atau identitas seseorang atau kelompok (H.A.R. Tilaar, 2003:60).

BUKU TEKS SEJARAH

Menurut Wawan Darmawan (2010:100) *“the history lesson text book as a historiography work for educational purpose does not ignore the historiographycal rules of history science”*. Idealnya, harus ada sinkronisasi antara sejarah akademis dengan sejarah untuk kepentingan pendidikan di dalam buku teks. Namun, hal ini tidak mudah karena adanya perbedaan tujuan dalam penulisan historiografinya. Sejarah akademis terutama bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah melalui metode sejarah, sementara itu sejarah untuk kepentingan pendidikan diarahkan untuk penanaman nilai dan pelestarian memori kolektif.

Agus Mulyana (2011:10) mengungkapkan bahwa kepentingan penanaman nilai atau ideologi dan kepentingan kajian kritis dalam buku teks seharusnya dapat

dipadukan. Ideologi atau nilai-nilai dapat tertanam dalam diri siswa ketika membaca buku teks pelajaran sejarah secara kritis, bukan penanaman ideologi atau nilai-nilai yang bersifat indoktrinasi. Membaca buku teks pelajaran secara kritis lebih mengembangkan kebenaran yang berangkat dari daya nalar siswa ketika membaca perjalanan sejarah bangsanya.

Kurikulum yang menjadi patokan penulisan buku teks merupakan produk politik pendidikan pemerintah pada masanya (Agus Mulyana, 2011:5). Oleh karenanya penyusunan buku teks sejarah selalu berkaitan dengan kebijakan politik pemerintah yang sedang berkuasa. Buku teks sejarah merupakan bagian dari sejarah resmi pemerintah. Pemerintah sebagai penentu kebijakan melakukan rekonstruksi dan seleksi terhadap peristiwa-peristiwa apa saja yang harus ditulis dalam buku teks dan bagaimana interpretasinya.

Penulisan buku teks Sejarah mengacu pada kurikulum yang diterapkan pada masanya. Misalnya saja Buku Sekolah Elektronik (BSE) yang disusun sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penulis buku teks melakukan interpretasi terhadap Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang terdapat dalam KTSP untuk mata pelajaran Sejarah.

Buku Sekolah Elektronik (BSE) Sejarah merupakan suatu produk kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan buku yang berkualitas, murah dan mudah untuk diakses. Kebijakan ini bertolak dari kondisi sebelumnya yaitu banyak siswa maupun guru yang kesulitan untuk mendapatkan buku teks yang berkualitas, murah dan mudah untuk diakses.

Depdiknas membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk memfasilitasi penyediaan buku bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan harga yang terjangkau. Buku-buku yang dibeli hak ciptanya dan diedarkan dalam bentuk Buku Sekolah Elektronik (BSE) dinilai kelayakan pakainya terlebih dahulu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebelum digunakan oleh pendidik dan/atau peserta didik sebagai sumber belajar di satuan pendidikan. Kelayakan buku teks yang tersebut kemudian ditetapkan oleh Mendiknas.

BSNP menetapkan beberapa kriteria dalam penilaian buku teks Sejarah SMA yang akan dibeli hak ciptanya dan diedarkan dalam bentuk BSE. Kriteria itu

meliputi komponen kelayakan isi, komponen kebahasaan, dan komponen penyajian.

ANALISIS WACANA KRITIS TEKS PENDIDIKAN

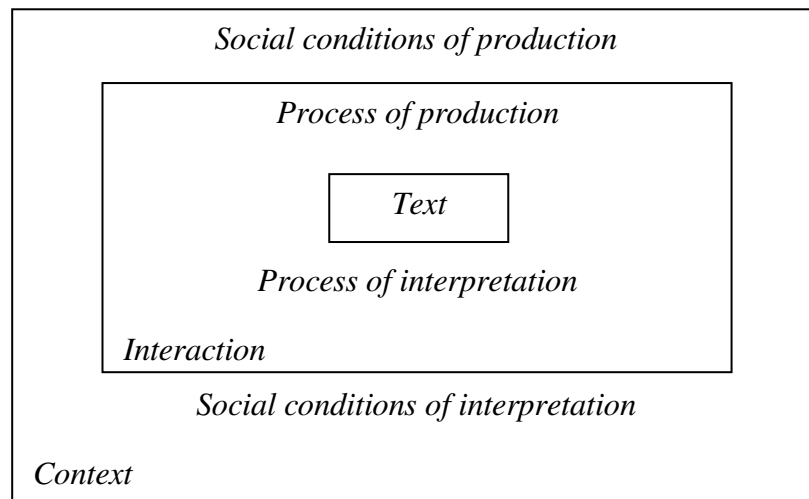
Analisis wacana kritis berangkat dari pendekatan kritis yang melihat adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam komunikasi. Penekanan pendekatan kritis dalam komunikasi ini proses produksi dan reproduksi makna, yang mana makna yang berasal dari bahasa yang digunakan oleh individu merupakan representasi yang membentuk subyek tertentu. Paradigma kritis melihat masyarakat sebagai sistem dominasi yang terdiri dari berbagai macam kelas, di mana kelas yang dominan memiliki kekuasaan untuk mengatur segala segi kehidupan, termasuk mengatur wacana dan makna dalam masyarakat. Oleh karenanya makna bukan suatu hal yang netral.

Analisis wacana kritis memandang wacana sebagai praktik sosial. Rebecca Rogers (2005:370) mengungkapkan

Within a CDA tradition, discourse has been defined as language use as social practice. That is, discourse moves back and forth between reflecting and constructing the social world. Seen in this way, language can not be considered neutral, because it is caught up in political, social, racial, economic, religious, and cultural formations.

Implikasi dari pandangan bahwa wacana sebagai praktik sosial adalah dalam memahami teks harus memahami pula konteks sosialnya. Norman Fairclough (1998:25) mengungkapkan,

Discourse involves social conditions, which can be specified as social conditions of production, and social conditions of interpretation. These conditions, moreover, relate to three different 'level' of social organization: the level of the social situation, or the immediate social environment in which discourse occurs; the level of social institution which constitutes a wider matrix for the discourse; and the level of the society as a whole.



Bagan 1. Hubungan antara teks, interaksi, dan konteks menurut Fairclough

Fairclough (1998:26) mengungkapkan bahwa karena wacana adalah praktik sosial, maka dalam analisis wacana kritis tidak hanya menganalisis teks semata, juga bukan hanya menganalisis proses produksi dan interpretasi, tapi juga menganalisis hubungan antara teks, proses, dan kondisi sosialnya atau jika mengacu pada gambar di atas, hubungan antara teks, interaksi dan konteks.

Eriyanto (2001: 8-14) mengungkapkan beberapa karakteristik analisis wacana kritis, yaitu:

- (1) Tindakan. Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (*action*) yang mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi, bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Konsekuensinya, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi dan sebagainya. Konsekuensi lain dari pandangan di atas adalah wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran.

- (2) Konteks. Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, dan kondisi. Wacana dalam hal ini dipandang diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Ada beberapa konteks yang penting karena berpengaruh terhadap produksi wacana, yaitu partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana, dan setting sosial.
- (3) Historis. Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu sehingga perlu untuk memahami mengapa wacana yang berkembang dan dikembangkan sedemikian rupa.
- (4) Kekuasaan. Setiap wacana yang muncul dalam teks tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Kekuasaan itu dalam hubungannya dengan wacana penting untuk melihat apa yang disebut sebagai kontrol, baik kontrol atas teks maupun konteks.
- (5) Ideologi. Teks adalah bentuk praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi makna. Wacana dipandang sebagai medium kelompok dominan mempersuasi dan mengomunikasikan produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki sehingga tampak absah dan benar.

Wacana sebagai praktik sosial tak jarang muncul dalam bentuk praktik ideologi. Yose Aliah Darma (2009:56) membatasi ideologi dalam kaitannya dengan analisis wacana kritis sebagai sebuah sistem nilai atau gagasan yang dimiliki oleh kelompok atau lapisan masyarakat tertentu, termasuk proses-proses yang bersifat umum dalam produksi makna dan gagasan.

Wacana sebagai praktik ideologi memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antar kelas sosial di mana

ketidakseimbangan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan. Eriyanto (2001:74-75) menyebutkan bahwa,

Wacana membatasi bidang pandangan kita, mengeluarkan sesuatu yang berbeda dalam batas-batas yang telah ditentukan. Ketika aturan dari wacana dibentuk, pernyataan kemudian disesuaikan dengan garis yang telah ditentukan. ... Objek bisa jadi tidak berubah, tetapi struktur diskursif yang dibuat membuat objek menjadi berubah. ... Contoh yang paling dramatis barangkali adalah bagaimana struktur diskursif yang dibangun tentang PKI sebagai partai terlarang. Pada masa Orde Lama, partai ini adalah partai resmi bahkan masuk dalam lima besar partai yang memperoleh suara terbanyak. Di masa Orde Baru, PKI justru menjadi partai terlarang dengan segala keburukannya. Tidak ada yang berubah dalam PKI ini (sebagai objek), tetapi yang membuat ia terlarang adalah struktur diskursif yang sengaja dibangun oleh Orde Baru bahwa PKI ini partai yang suka memberontak dan anti-Tuhan. Wacana semacam ini membatasi lapangan pandangan sehingga ketika PKI dibicarakan yang muncul adalah kategori PKI sebagai partai pemberontak dan anti-Tuhan, bukan yang lain.

Ideologi dalam praktik wacana seringkali tidak menampilkan diri secara eksplisit, namun secara implisit berupa *hidden transcript* dalam teks. Ideologi menerobos dalam relung-relung konteks sosial sehingga dalam produksi dan interpretasi teks yang telah dipenuhi oleh berbagai *hidden transcript* tersebut pandangan yang sesuai dengan ideologi dianggap sebagai suatu kewajaran meskipun ideologi itu memproduksi hubungan yang tidak seimbang antar kelompok dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi tidak hanya menguasai atau mengontrol teks, tapi juga konteks sosialnya.

Wacana dalam buku teks dapat dipandang sebagai sebuah praktik ideologi yang memproduksi hubungan yang tidak seimbang antar kelompok dalam masyarakat. Negara menggunakan wacana dalam buku teks untuk mengukuhkan kedudukannya dan melakukan subordinasi terhadap kelompok yang menentangnya. Pembaca buku teks diajak untuk mengikuti dan menerima wacana tersebut sebagai suatu kewajaran.

Negara melakukan hegemoni melalui wacana dalam buku teks. Menurut Michael Apple (dalam Tilaar, 2003:31) "*The concept of hegemony refers to a*

process in which dominant group in society come together to form a block and sustain leadership over subordinate groups” Sementara itu menurut Gramsci (dalam Tilaar, 2003:77-78) hegemoni adalah kondisi sosial dalam semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau disokong oleh kelas tertentu. Dalam pandangan Gramsci, hegemoni kekuasaan yang dijalankan oleh alat-alat negara dengan jitu dan jeli bisa membuat rakyat yang ada di dalam kuasanya menjadi tenteram, dan aman dalam penindasannya. Menurut Dedy Kristanto (1997:31) “hegemoni tidak tampil dalam wajah seram, namun halus memikat siapa saja yang ada di sekitarnya, namun akhirnya mereka takluk mutlak dalam tangan kekuasaan”. Dasar konstruksi hegemoni negara di Indonesia menurut Michael van Langenberg (1996:225) adalah ketertiban; stabilitas dan keamanan nasional; bahaya laten di dalam tubuh politik dan masyarakat madani; kemajuan material dan modernisasi; konstitusionalisme dan fetishisme hukum; serta kesakralan filosofi nasional; dan korporasi nasionalisme.

Keberhasilan hegemoni ditentukan oleh terciptanya kesepakatan. Jelaslah kiranya kesepakatan itu dibentuk melalui proses belajar (H.A.R. Tilaar, 2009:138). Dengan demikian hegemoni adalah hubungan edukasional (*educational relationship*). Hubungan edukasional inilah yang membentuk *civil society* yang di dalamnya terletak dasar dari kekuasaan. Lembaga-lembaga pendidikan tidak netral, tetapi merupakan perekat hegemoni dalam masyarakat, atau dengan kata lain secara intern terikat kepada intens dari kelompok yang berkuasa.

Negara dan sistem politik cenderung menempatkan pendidikan sebagai agen dalam pembentukan realitas masyarakat, salah satunya melalui buku-buku teks yang telah ditentukan produksi, distribusi dan konsumsinya oleh pemerintah melalui kebijakan pendidikan. Konstruksi yang dibangun negara terhadap ideologi yang dipahaminya merupakan upaya yang komprehensif dan menyeluruh melalui praktik wacana baik dalam aspek teks maupun dalam aspek pengajarannya. Murti Kusuma Wirasti (2002:31) menyebutkan bahwa sebagai wacana resmi negara, teks-teks pendidikan berisi representasi-representasi sosial di mana makna dapat

dianggap tidak netral karena dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.

REPRESENTASI IDEOLOGI NEGARA

Representasi ideologi negara dalam buku teks salah satunya nampak dalam BSE Sejarah Kelas XII IPA. Beberapa tema ideologi yang muncul dalam buku teks sejarah ini adalah konstitusionalisme, anti komunisme/sosialis komunis, stabilitas, pembangunan/kemajuan, demokrasi/kemerdekaan/hak asasi manusia, anti Orde Baru, dan globalisasi ekonomi/liberalisme kapitalisme.

Tema konstitusionalisme muncul dalam lima dari empat belas subbab yang dianalisis. Penulis buku merepresentasikan berbagai peristiwa atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik semasa Orde Baru maupun Reformasi sebagai usaha atau jalan yang konstitusional. Misalnya saja lahirnya Orde Baru maupun Reformasi direpresentasikan berjalan secara konstitusional. Sementara itu ada pula peristiwa atau kebijakan yang dikonstruksikan sebagai tindakan inkonstitusional dalam teks, misalnya saja masalah kebijakan konfrontasi dengan Malaysia yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, ataupun Dekrit Presiden yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Secara tidak langsung teks ingin menekankan bahwa kebijakan yang diambil oleh setiap pemerintahan seharusnya selalu memiliki landasan konstitusional, yaitu UUD 1945. Tindakan inkonstitusional digambarkan sebagai tindakan yang tidak baik.

Tema anti komunisme/sosialis komunis muncul dalam empat subbab. Secara umum komunisme ataupun sistem sosialis komunis direpresentasikan secara negatif dalam teks. Dalam konteks sejarah Indonesia misalnya, PKI dikonstruksikan sebagai pelaku peristiwa G30S melalui penyebutan G30S/PKI. Selain itu dalam teks pada subbab pertama juga disebutkan adanya usaha pembersihan terhadap unsur-unsur yang diduga terkait dengan G30S/PKI. Penggunaan kata “pembersihan” seakan menggambarkan bahwa kehidupan politik di Indonesia saat itu tercemar dengan PKI. Dalam konteks Perang Dingin pun

Blok Timur yang menganut sosialis komunis direpresentasikan secara negatif. Misalnya saja dalam teks mengenai Perang Korea direpresentasikan bahwa tindakan Cina yang membantu Korea Utara menduduki Seoul sebagai tindakan yang salah, sementara tindakan Amerika Serikat membantu Korea Selatan menduduki Pyongyang direpresentasikan sebagai usaha menjaga stabilitas keamanan dan menyatukan kedua Korea.

Tema lain yang muncul dalam teks adalah stabilitas. Tema ini muncul dalam tujuh dari empat belas subbab yang dianalisis. Stabilitas baik dalam bidang keamanan, politik maupun ekonomi direpresentasikan sebagai hal yang penting. Stabilitas keamanan dan politik dikonstruksikan sebagai dasar dalam mencapai stabilitas ekonomi. Oleh karenanya kedua hal itu harus dicapai terlebih dahulu. Masa-masa awal lahirnya Orde Baru maupun Reformasi dikonstruksikan sebagai masa yang tidak stabil sebagai akibat dari peristiwa maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintahan pada masa sebelumnya sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencapai stabilitas ini.

Tema pembangunan/kemajuan materiil muncul dalam tiga subbab. Tema ini muncul terutama dalam teks yang membahas mengenai keberhasilan pembangunan dan perkembangan teknologi yang dicapai semasa pemerintahan Orde Baru. Selain itu tema ini juga muncul dalam teks yang membahas mengenai perkembangan teknologi pada masa Perang Dingin. Pembangunan ataupun kemajuan dikonstruksikan sebagai keberhasilan yang dicapai suatu negara.

Tema demokrasi/kemerdekaan/hak asasi manusia muncul dalam tiga subbab. Dalam konteks Indonesia, demokrasi direpresentasikan sebagai hal yang baik. Pemerintahan Orde Baru dikonstruksikan telah mampu melaksanakan praktik demokrasi melalui penyelenggaraan pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Kemerdekaan dikonstruksikan sebagai hak semua bangsa. Indonesia dikonstruksikan berperan serta dalam usaha mendukung perjuangan bangsa-bangsa lain dalam memperoleh kemerdekaan maupun persamaan hak asasi manusia.

Teks juga menampilkan tema anti Orde Baru. Meskipun di dalam teks Orde Baru lebih banyak direpresentasikan secara positif, namun Orde baru juga

direpresentasikan secara negatif, misalnya saja Orde Baru dikonstruksikan melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya termasuk dengan membelenggu kehidupan masyarakat. Orde Baru juga dikonstruksikan sebagai biang keladi atas instabilitas politik dan ekonomi yang memuncak pada 1998.

Tema lain yang muncul adalah globalisasi ekonomi/liberalis kapitalis yang direpresentasikan sebagai hal yang tidak dapat dihindari. Indonesia mau tidak mau terseret dalam arus globalisasi ekonomi yang didominasi oleh kepentingan kaum liberalis kapitalis. Sistem liberalis kapitalis lebih banyak dikonstruksikan secara positif. Negara yang menerapkan sistem ini digambarkan sebagai negara yang mampu mengatasi masalah ekonominya dan mampu bangkit menjadi negara maju setelah berakhirnya Perang Dunia II maupun semasa Perang Dingin.

Beberapa tema ideologi yang muncul dalam BSE Sejarah Kelas XII IPA tersebut ternyata memiliki kemiripan dengan tema-tema ideologi yang ditemukan oleh Murti Kusuma Wirasti dalam penelitiannya tahun 2002 tentang wacana ideologi negara dalam teks pendidikan tahun 1975-2001, yaitu konstitusionalisme, anti komunisme, stabilitas, pembangunan/kemajuan, demokrasi/kemerdekaan/hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tema-tema ideologi yang diwacanakan sejak masa Orde Baru tersebut masih terus bertahan meskipun rezim telah berubah.

Pada masa awal reformasi beberapa wacana sejarah Orde Baru sempat dipertanyakan, termasuk sejarah resmi versi negara (*official history*) yang diajarkan di sekolah, sehingga terjadi perubahan dalam kurikulum sejarah dengan keluarnya Suplemen 1999. Topik-topik yang sensitif seperti mengenai PKI, Cina, Orde Baru dan Timor Timur ditinjau ulang. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat di awal reformasi. Pada masa reformasi juga muncul berbagai buku atau tulisan sejarah alternatif yang berbeda dengan *official history* versi Orde Baru.

Suplemen Kurikulum 1999 kemudian diganti dengan Kurikulum 2004. Namun kurikulum ini tidak bertahan lama karena ada desakan dari beberapa pihak terkait dengan masalah peristiwa G30S dan peristiwa Madiun 1948. Mendiknas pun menghentikan penggunaan kurikulum 2004 khusus untuk mata pelajaran

sejarah dan kembali ke kurikulum 1994. Perubahan ini tentu saja disayangkan karena merupakan suatu kemunduran. Kembali kepada kurikulum 1994 berarti kembali kepada *official history* versi Orde Baru yang sarat dengan wacana dan ideologi Orde Baru yang banyak digugat sejak masa Reformasi.

Official history mengenai peristiwa G30S dan peristiwa Madiun 1948 versi Orde Baru dilanjutkan dalam KTSP yang mulai diterapkan tahun 2006. Tafsir lain tidak diperkenankan untuk muncul dalam buku teks pelajaran sejarah karena dianggap tidak selaras dengan fakta sejarah. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk domestifikasi yang berujung pada pembodohan yang dilakukan oleh negara. Tilaar (2003:90) menyebutkan bahwa proses domestifikasi atau penjinakan dalam dunia pendidikan membunuh kreativitas dan menjadikan manusia atau peserta didik sebagai robot-robot yang sekedar menerima transmisi nilai-nilai kebudayaan yang ada. Domestifikasi dalam dunia pendidikan berujung pada pembodohan (stupidifikasi).

Hasil analisis teks juga menunjukkan bahwa Soeharto maupun Orde Baru lebih banyak direpresentasikan secara positif daripada secara negatif dalam teks. Selain itu penguasa ataupun rezim pemerintahan yang lain, baik sebelum maupun sesudah Orde Baru, lebih sering direpresentasikan secara negatif.

Hal ini tentu saja menarik jika dihubungkan dengan salah satu karakteristik *official history* yang diajarkan di sekolah menurut S. Hamid Hasan (2008:415) yaitu narasi sejarah nasional dalam tafsiran resmi selalu pula diwarnai oleh gambaran hitam putih dan penuh kebencian terhadap masa lalu. Bila mengacu pada teori tersebut, maka seharusnya Orde Baru direpresentasikan secara negatif, ditempatkan dalam posisi hitam, sementara Reformasi seharusnya direpresentasikan secara positif dan ditempatkan dalam posisi putih. Namun hal ini tidak terjadi karena meskipun sisi negatif dari Soeharto dan pemerintahan Orde Baru ditampilkan dalam teks, tapi yang lebih banyak ditonjolkan adalah sisi positifnya. Meskipun reformasi direpresentasikan secara positif, namun masa ini lebih banyak direpresentasikan secara negatif. Selain itu Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama dan Soekarno tetap direpresentasikan secara negatif dalam teks. Hal ini menunjukkan kuatnya hegemoni yang berlangsung sejak masa Orde Baru.

Penyeragaman wacana dan klaim kebenaran yang dilakukan oleh rezim Orde Baru umumnya diterima sebagai suatu kewajaran sehingga melahirkan hegemoni negara atas tafsir sejarah. Dalam pandangan Gramsci (dalam Tilaar, 2003:78) hegemoni kekuasaan yang dijalankan oleh alat-alat negara dengan jitu dan jeli bisa membuat rakyat yang ada di dalam kuasanya menjadi tenteram, dan aman dalam penindasannya. Hegemoni ini berlangsung cukup lama sehingga tafsir resmi negara rezim Orde Baru atas berbagai peristiwa sejarah diterima sebagai kebenaran meskipun belum tentu sesuai dengan fakta ataupun temuan-temuan baru yang muncul sejak masa Reformasi. Kuatnya hegemoni wacana sejarah masa Orde Baru juga menyebabkan perubahan *mind set* sulit untuk terjadi meskipun jiwa zaman telah berubah. Kecenderungan kemiripan tema-tema ideologi negara yang muncul dalam teks pendidikan di masa Orde Baru dan Reformasi juga menunjukkan kuatnya representasi Orde Baru sebagai “zaman normal” yang dirindukan. Stabilitas dan kemajuan ekonomi Orde Baru direpresentasikan secara positif, sementara masa Reformasi cenderung direpresentasikan sebagai masa yang kacau, dan masyarakat tidak dapat menikmati stabilitas politik, keamanan maupun ekonomi. Hal ini secara tidak langsung menggiring pada sebuah romantisme, yaitu ingin kembali seperti pada masa Orde Baru.

Domestifikasi atau penjinakan melalui penyeragaman wacana tidak hanya dilakukan secara halus, tapi juga didukung oleh tindakan represif berupa pelarangan buku-buku pelajaran sejarah yang dianggap tidak selaras dengan fakta sejarah versi negara tersebut. Menurut Winarno Surakhmad (2009:7) pendidikan selama ini telah menjadi lembaga penyeragaman. Keseragaman ini berfungsi untuk mewariskan nilai-nilai masa lalu yang seragam, yang kemudian melahirkan sikap mental konfirmistik dan peniruan berpikir klise, bahkan mendorong timbulnya selera yang seragam. Buku teks merupakan salah satu alat penyeragaman tersebut.

KESIMPULAN

Penyeragaman wacana yang berusaha dilakukan oleh negara sebenarnya sudah tidak relevan dengan perkembangan akademik dan perkembangan teknologi. Suasana keterbukaan sejak reformasi telah melahirkan beragam tafsir atas peristiwa sejarah yang berbeda dengan versi resmi negara. Tafsir ini dengan mudah bisa didapatkan melalui berbagai buku maupun artikel. Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, juga mempermudah akses terhadap sumber ataupun tulisan sejarah alternatif yang berbeda dengan versi resmi negara. Jadi, meskipun negara berusaha melakukan penyeragaman wacana melalui buku teks pelajaran sejarah namun usaha itu berhadapan dengan adanya wacana alternatif yang mudah untuk diakses.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Mulyana. 2011. *Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah di Sekolah: Antara Kepentingan Kekuasaan dan Studi Kritis*. dalam <http://berita.upi.edu/2011/07/26/historiografi-buku-teks-pelajaran-di-sekolah/> diakses 25 Agustus 2011, pukul 12.55.
- D. Kristanto. 1997. "Raibnya Suara Intelektual" dalam *Basis No. 9-10 Tahun ke-46, September-Oktober 1997*. Yogyakarta: Yayasan BP Basis.
- De Amezola, G. 2007. "A 'Necessary' Dictatorship: The 'Age of Rosas' in Argentine History Textbooks Published between 1956 and 1983 and the Defence of Authoritarianism" dalam *Pedagogica Historica*. Vol. 43 No. 5, 669-684.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. 1998. *Language and Power*. London: Longman.
- H.A.R. Tilaar. 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesiatara
- _____. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M.K Wirast,. 2002. "Wacana Ideologi Negara dalam Pendidikan: Analisis Wacana Kritis pada Buku-buku Teks Pendidikan untuk SD dan SLTP

Tahun 1975-2001”. *Tesis*. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Rogers, R. 2005. “Critical Discourse Analysis in Education: A Review Literature” dalam *Review of Educational Research*, Vol. 75 No. 3., 365 – 416.

Said Hamid Hasan. 2008. ”Pendidikan Sejarah Dalam Rangka Pengembangan Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa” dalam M. Nursam, Baskara T. Wardaya S.J., dan Asvi Warman Adam (Eds) *Sejarah yang Memihak: Mengenang Sartono Kartodirjo*. Yogyakarta: Ombak

Shnirelman, V. 2009. “Stigmatized by History or by Historians? The Peoples of Russia in School History Textbooks” dalam *History & Memory*, Vol. 21, No. 2 (Fall/Winter 2009), 110-149.

Van Langenberg, M. 1996. “Negara Orde Baru: Bahasa, Ideologi, Hegemoni” dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (Eds) *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.

W. Darmawan. 2010. “Historiography Analysis of History Text Book from Neerlandocentric to Scientific” dalam *Historia: International Journal of History Education*, Vol. XI, No. 2., 99-118

Y.A. Darma. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: CV Yrama Widya.